

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi politik di Indonesia yang dimulai sejak kejatuhan rezim Soeharto telah membawa perubahan fundamental dalam sistem demokrasi, terutama dalam hal partisipasi politik masyarakat. Pemilihan umum (Pemilu) menjadi instrumen utama dalam menyalurkan aspirasi rakyat serta menentukan pemimpin di tingkat nasional maupun daerah (Napir, 2019). Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme legitimasi pemerintahan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik yang bersifat langsung dan terbuka, sehingga dapat meningkatkan kesadaran serta pemahaman masyarakat mengenai demokrasi. Namun, keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada sistem yang diterapkan, tetapi juga pada berbagai faktor pendukung seperti tingkat kesejahteraan masyarakat, budaya politik yang berkembang, dan struktur sosial yang mendukung proses demokratisasi. Menurut Rose dan Mossawir yang dikutip Yuzka (2015) menekankan bahwa pemilu memiliki berbagai fungsi strategis, mulai dari menentukan pemerintahan, mengukur dukungan rakyat terhadap penguasa, hingga menjadi sarana bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi mereka kepada pemerintah.

Seiring dengan berkembangnya demokrasi, sistem pemilu yang diterapkan di berbagai negara juga beragam, mulai dari sistem distrik, proporsional, hingga campuran, masing-masing dengan karakteristik dan dampaknya terhadap representasi politik. Dalam konteks Indonesia, reformasi telah mendorong desentralisasi pemerintahan, memberikan kewenangan lebih besar kepada daerah dalam memilih pemimpinnya. Hal ini menciptakan ruang bagi masyarakat untuk lebih aktif dalam menentukan arah kebijakan di tingkat lokal. Pemilu di era Reformasi menjadi simbol keterbukaan politik yang lebih inklusif, namun tetap menghadapi tantangan dalam memastikan transparansi, keadilan, serta efektivitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, agar pemilu dapat berjalan optimal, diperlukan kebijakan yang mendukung stabilitas demokrasi serta meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat.

Menurut Sarwono yang dikutip dari Surahmadi (2016), Pilkada pada dasarnya adalah bentuk pengakuan dan pelaksanaan hak politik rakyat, sekaligus menjadi proses di mana hak tersebut diberikan kepada para wakil yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Pada masa awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia masih dalam tahap pembentukan. Saat itu, kepala daerah seperti gubernur, bupati, dan wali kota tidak dipilih langsung oleh rakyat, melainkan ditentukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sistem ini diterapkan selama beberapa dekade sejak tahun 1945, di mana DPRD memiliki wewenang untuk memilih kepala daerah dari calon yang diajukan oleh partai politik atau kelompok berpengaruh di parlemen daerah. Proses ini dianggap sebagai bentuk demokrasi tidak langsung, karena rakyat hanya memilih anggota DPRD, yang kemudian menentukan kepala daerah. Namun, sistem ini kerap diperdebatkan terkait kualitas demokrasinya, sebab kepala daerah cenderung lebih loyal kepada partai politik atau anggota DPRD dibandingkan kepada rakyat secara langsung.

Dengan dimulainya Reformasi pada tahun 1998, sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan besar, termasuk dalam mekanisme pemilihan kepala daerah. Salah satu tuntutan utama dalam reformasi adalah meningkatkan partisipasi masyarakat serta mendorong desentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah. Meskipun demikian, pemilihan kepala daerah masih tetap dilakukan melalui DPRD hingga tahun 2005. Sistem ini akhirnya mengalami perubahan mendasar setelah diterapkannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memperkenalkan mekanisme Pilkada langsung. Dalam sistem baru ini, rakyat di setiap provinsi, kabupaten, dan kota diberikan hak untuk secara langsung memilih kepala daerah mereka. Pilkada langsung pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2005, dan sejak saat itu menjadi standar dalam proses pemilihan kepala daerah.

Perubahan ini dianggap sebagai langkah maju dalam demokrasi Indonesia, karena memberikan rakyat kontrol lebih besar dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Namun, di balik keberhasilannya, Pilkada langsung juga menghadapi berbagai tantangan, seperti praktik politik uang, persaingan politik yang semakin sengit, serta berbagai kendala teknis dalam penyelenggaraannya. Meskipun demikian, sistem ini tetap menjadi simbol penting dari demokrasi yang lebih

partisipatif di Indonesia. Pilkada merupakan bagian dari proses rekrutmen politik, di mana masyarakat menyeleksi kandidat yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, maupun wali kota dan wakil wali kota. Dalam sistem ini, tiga aktor utama yang berperan adalah rakyat, partai politik, dan calon kepala daerah.

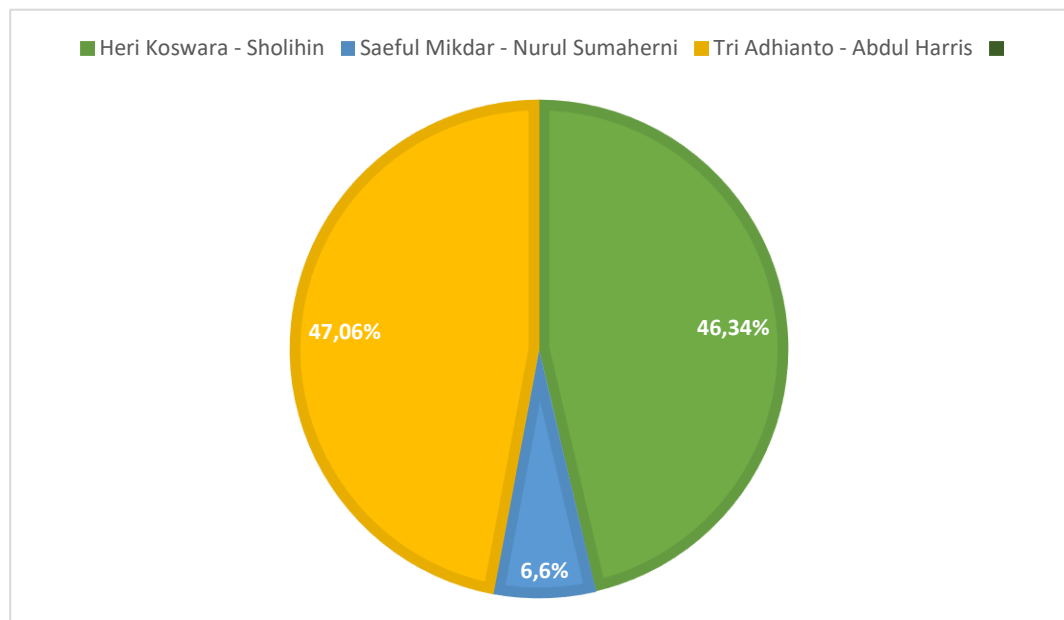
Pilkada Kota Bekasi 2024 menjadi ajang persaingan politik yang ketat antara Tri Adhianto - Abdul Harris Bobihoe, yang berstatus sebagai petahana, dan Heri Koswara - Sholihin, yang memperoleh dukungan kuat dari partai-partai berbasis Islam. Sebagai petahana, Tri Adhianto - Abdul Harris Bobihoe didukung oleh koalisi besar yang terdiri dari PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, Perindo, Gelora, Partai Buruh, PBB, PKN, dan Partai Ummat. Dengan sokongan partai-partai besar ini, pasangan Tri-Harris memiliki modal politik yang solid, baik dalam hal infrastruktur kampanye maupun jaringan pemerintahan yang telah mereka bangun sebelumnya. Status sebagai petahana memberikan keuntungan tersendiri bagi mereka, termasuk tingkat pengenalan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat serta kesempatan untuk menawarkan kesinambungan program pembangunan di Kota Bekasi.

Namun, perjalanan menuju kemenangan tidaklah mudah. Heri Koswara - Sholihin tampil sebagai lawan tangguh dengan dukungan besar dari partai-partai Islam, seperti PKS, PPP, PAN, PSI, dan Hanura. PKS, yang memiliki basis massa terbesar di Kota Bekasi, berperan sebagai penggerak utama dalam menggalang dukungan untuk pasangan ini. Sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi sekaligus anggota DPRD Jawa Barat, Heri Koswara memiliki jaringan yang luas di kalangan kader partai serta simpatisan Islam di wilayah tersebut. Sementara itu, Sholihin, yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi, semakin memperkuat daya tarik pasangan ini, khususnya di kalangan umat Islam tradisional dan komunitas santri.

Pilkada ini menjadi ajang persaingan antara dua kekuatan politik utama di Kota Bekasi, yaitu koalisi partai nasionalis yang besar dengan keunggulan petahana, berhadapan dengan soliditas basis massa partai-partai Islam yang telah mengakar kuat di wilayah ini. Selama kampanye, kedua pasangan calon bersaing dalam menawarkan gagasan mengenai masa depan Pembangunan Kota Bekasi. Tri

Adhianto menitikberatkan pada keberlanjutan program pembangunan serta stabilitas pemerintahan, sementara Heri Koswara mengusung perubahan dengan visi yang lebih selaras dengan aspirasi kelompok Islam dan komunitas lokal.

Persaingan dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 semakin terasa sengit ketika hasil perhitungan suara menunjukkan selisih yang tipis antara kedua pasangan calon. Meskipun Tri Adhianto - Abdul Harris Bobihoe berhasil memenangkan kontestasi, hasil tersebut juga mencerminkan kekuatan oposisi yang diwakili oleh Heri Koswara - Sholihin, yang membuktikan bahwa partai-partai Islam masih memiliki pengaruh besar dalam lanskap politik Kota Bekasi.



Gambar 1. 1 Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Bekasi Tahun 2024

Sumber: pilkada2024.kpu.go.id/jabar/bekasi (2024)

Gambar 1.1 menampilkan rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi tahun 2024 dalam bentuk diagram lingkaran. Berdasarkan visualisasi data, pasangan Tri Adhianto - Abdul Harris memperoleh suara terbanyak dengan persentase sebesar 47%, diikuti oleh pasangan Heri Koswara - Sholihin yang memperoleh 46% suara. Sementara itu, pasangan Saeful Mikdar - Nurul Sumaherni hanya meraih 7% suara, yang menunjukkan bahwa persaingan utama dalam Pilkada ini terjadi antara dua pasangan calon teratas. Selisih tipis antara Tri Adhianto - Abdul Harris dan Heri Koswara - Sholihin mengindikasikan adanya kompetisi yang ketat dalam kontestasi politik lokal di Kota Bekasi.

Dalam konteks strategi kemenangan, dukungan partai politik menjadi faktor kunci dalam perolehan suara masing-masing pasangan calon. Tri Adhianto - Abdul Harris diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai yang memiliki basis massa kuat di Kota Bekasi serta pengalaman dalam mengelola strategi politik di tingkat daerah. Keunggulan pasangan ini juga didukung oleh status Tri Adhianto sebagai petahana, yang memberikan keuntungan elektoral dalam aspek popularitas dan rekam jejak pemerintahan. Sementara itu, Heri Koswara - Sholihin diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang dikenal memiliki jaringan kader yang solid serta basis pemilih loyal, terutama di segmen pemilih berbasis ideologi Islam. Hasil yang diperoleh pasangan ini menunjukkan bahwa PKS tetap menjadi kekuatan politik yang signifikan di Kota Bekasi. Di sisi lain, Saeful Mikdar - Nurul Sumaherni, yang didukung oleh Partai Golkar dan Partai NasDem, tampaknya mengalami kesulitan dalam menggali dukungan yang cukup besar, kemungkinan karena kurangnya mesin politik yang kuat serta keterbatasan popularitas di tingkat lokal. Dengan demikian, hasil Pilkada Kota Bekasi 2024 menunjukkan bahwa kompetisi politik di tingkat daerah sangat dipengaruhi oleh kekuatan jaringan partai, strategi kampanye, serta rekam jejak calon dalam pemerintahan.

Pilkada ini menjadi salah satu peristiwa politik daerah yang menarik perhatian, bukan hanya karena pertarungan antara petahana dan oposisi, tetapi juga karena mencerminkan dinamika politik nasional, di mana koalisi nasionalis dan kekuatan politik berbasis Islam terus bersaing dalam menentukan arah kepemimpinan di Indonesia.

Dalam kompetisi pemilu, partai politik harus bersaing satu sama lain untuk meraih kemenangan. Keberhasilan dalam pemilu sangat bergantung pada penerapan strategi politik yang tepat. Setiap partai perlu menyusun strategi yang efektif agar dapat mencapai tujuan utama mereka, yaitu memperoleh kekuasaan. Tanpa strategi yang jelas, peluang untuk memenangkan pemilu akan semakin kecil. Oleh karena itu, penerapan strategi politik dalam mendekati dan meyakinkan masyarakat menjadi faktor krusial dalam setiap pemilihan umum. Keberhasilan suatu partai dalam merancang, menyusun, dan menjalankan strategi politik akan sangat berpengaruh terhadap perolehan suara mereka. Strategi yang terarah dan

tepat sasaran akan mempermudah perencanaan taktis serta mempercepat proses pelaksanaannya. Secara umum, strategi dapat diartikan sebagai suatu bentuk perencanaan dan pengelolaan yang sistematis guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.(Ibrahim, 2022)

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah dengan jumlah pemilih yang besar di Provinsi Jawa Barat, menjadikannya wilayah yang strategis dalam konteks pemilihan kepala daerah. Dengan jumlah pemilih yang signifikan, pola politik di Kota Bekasi dapat memberikan gambaran lebih luas mengenai kecenderungan politik di daerah urban yang sedang berkembang pesat.

Dalam konteks Pilkada Kota Bekasi 2024 persaingan politik yang sangat kompetitif. Pilkada ini mempertemukan pasangan Tri Adhianto - Abdul Harris Bobihoe, yang berstatus sebagai petahana dan didukung oleh koalisi partai besar seperti PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, Perindo, Gelora, Partai Buruh, PBB, PKN, dan Partai Ummat, dengan pasangan Heri Koswara - Sholihin, yang memperoleh dukungan kuat dari partai-partai Islam seperti PKS, PPP, PAN, PSI, dan Hanura, selain itu pasangan Saeful Mikdar – Nurul memperoleh dukungan dari Golkar, NasDem, dan Garuda. Persaingan ini menggambarkan pertarungan antara dua kekuatan utama, yakni koalisi nasionalis yang dominan dalam pemerintahan daerah dan partai-partai Islam yang memiliki basis massa loyal di Kota Bekasi. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti karena memperlihatkan dinamika politik antara dua kelompok yang memiliki strategi berbeda dalam memenangkan suara masyarakat.

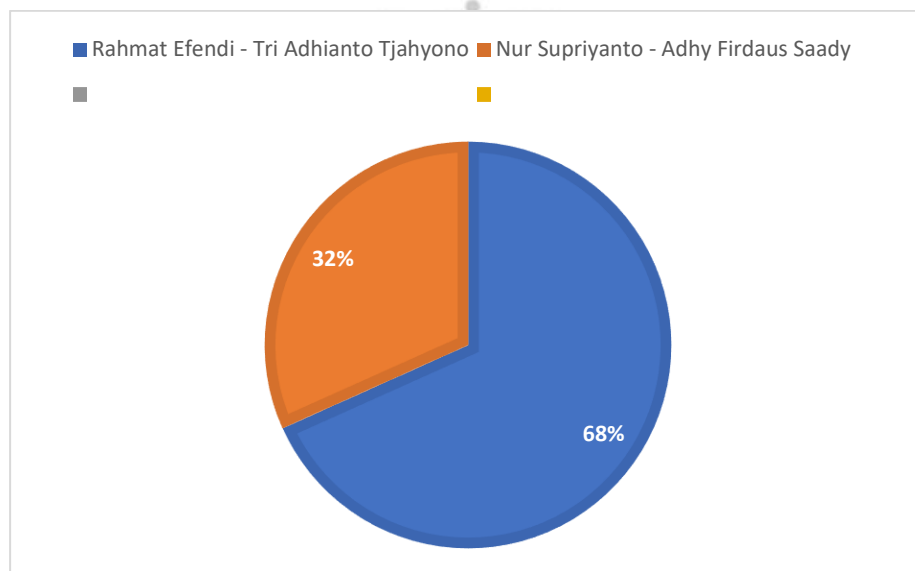
Selain itu, status Tri Adhianto sebagai petahana menambah kompleksitas dalam Pilkada ini. Sebagai pemimpin yang sudah menjabat sebelumnya, ia memiliki keuntungan dalam hal pengenalan publik dan jaringan pemerintahan yang telah dibangun. Namun, di sisi lain, ia juga menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dukungan masyarakat, terutama di tengah berbagai isu politik dan sosial yang berkembang selama masa kepemimpinannya. Hal ini menjadikan Kota Bekasi sebagai studi kasus yang relevan untuk meneliti bagaimana seorang petahana merancang strategi politik guna mempertahankan kekuasaan.

Di sisi lain, kehadiran PKS sebagai partai dengan basis massa terbesar di Kota Bekasi menunjukkan bagaimana partai berbasis agama tetap memiliki pengaruh

kuat dalam dinamika politik perkotaan. Heri Koswara, sebagai Ketua DPD PKS Kota Bekasi sekaligus anggota DPRD Jawa Barat, memiliki jaringan politik yang luas di kalangan kader partai dan simpatisan Islam. Pasangannya, Sholihin, yang menjabat sebagai Ketua DPC PPP Kota Bekasi, semakin memperkuat daya tarik pasangan ini di kalangan umat Islam tradisional dan komunitas santri. Hal ini menunjukkan bagaimana partai Islam merancang strategi kampanye untuk menghadapi dominasi partai nasionalis dalam Pilkada Kota Bekasi 2024.

Selain faktor politik, pemilihan Kota Bekasi sebagai locus penelitian juga relevan dalam konteks kajian strategi politik. Pilkada ini memberikan peluang untuk menganalisis bagaimana strategi pemenangan yang diterapkan oleh partai politik dalam sebuah kontestasi yang kompetitif. Dari penggunaan strategi komunikasi politik, mobilisasi massa, hingga pemanfaatan sumber daya politik, Pilkada Kota Bekasi 2024 menjadi contoh yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Dengan berbagai alasan tersebut, Kota Bekasi menjadi locus penelitian yang tepat untuk memahami lebih jauh bagaimana strategi politik PDIP dan koalisinya untuk memenangkan kandidat calonnya, yang lebih menariknya lagi, PDIP juga memenangkan Pilkada pada tahun 2018. Pada saat itu PDIP berkoalisi dengan Partai Golkar dengan pasangan calon Rahmat Efendi – Tri Adhianto Tjahyono.



Gambar 1. 2 Rekapitulasi Suara Pilkada Kota Bekasi 2018
Sumber: pilkada2018.kpu.go.id/jabar/bekasi (2018)

Gambar 1.2 menunjukkan hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi tahun 2018. Dari data tersebut, pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto Tjahyono berhasil memperoleh kemenangan dengan perolehan suara sebesar 68%, mengungguli pasangan Nur Supriyanto dan Adhy Firdaus Saady yang hanya memperoleh 32% suara. Perbedaan suara yang cukup signifikan menunjukkan dominasi pasangan Rahmat Effendi-Tri Adhianto dalam kontestasi politik saat itu. Kemenangan ini tidak terlepas dari berbagai faktor, termasuk kekuatan mesin politik partai pendukung, tingkat popularitas kandidat, serta strategi kampanye yang efektif dalam menjangkau masyarakat Kota Bekasi.

Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi tahun 2018 dan 2024 menunjukkan dinamika elektoral yang menarik, khususnya dalam konteks kemenangan Tri Adhianto pada 2024. Pada Pilkada 2018, kemenangan diraih oleh pasangan Rahmat Effendi dan Tri Adhianto dengan dukungan koalisi partai besar, termasuk Golkar, PDIP, dan partai-partai lainnya. Pasangan ini memperoleh suara mayoritas yang signifikan, mengungguli lawan politiknya dengan selisih yang cukup jauh. Sementara itu, pada Pilkada 2024, Tri Adhianto yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bekasi menggantikan Rahmat Effendi setelah kasus hukum yang menjeratnya, berhasil mempertahankan posisi dengan memperoleh 47% suara, unggul tipis dari pasangan Heri Koswara-Sholihin yang memperoleh 46% suara, serta pasangan Saeful Mikdar-Nurul Sumaherni yang hanya memperoleh 7% suara. Dukungan koalisi partai politik, khususnya PDIP, berperan penting dalam strategi kemenangan Tri Adhianto, yang juga diuntungkan oleh posisinya sebagai petahana.

Kemenangan Tri Adhianto dalam Pilkada 2024 dapat dijelaskan melalui efek petahana, yakni keuntungan elektoral yang diperoleh seorang kandidat karena telah menduduki jabatan sebelumnya. Sebagai petahana, Tri Adhianto memiliki keunggulan dalam aspek popularitas dan elektabilitas yang telah terbangun selama masa kepemimpinannya. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah akses terhadap sumber daya pemerintahan, yang memungkinkan petahana untuk menjalankan berbagai program pembangunan dan kebijakan populis yang dapat meningkatkan citra positifnya di mata masyarakat. Selain itu, basis dukungan politik yang telah terbangun sejak 2018 melalui jaringan partai dan mesin politik PDIP turut

menguatkan posisinya dalam Pilkada 2024. Meskipun selisih suara dengan pesaing utamanya relatif tipis, keberhasilannya dalam mempertahankan dukungan mayoritas menunjukkan bahwa masyarakat Kota Bekasi masih memberikan kepercayaan kepadanya untuk melanjutkan kepemimpinan dan juga latar belakang pemilih Kota Bekasi lebih menyukai dan memilih calon walikota dan wakil walikota karena alasan pengamalan di pemerintahan. Dengan demikian, efek petahana menjadi faktor dominan yang menjelaskan keberhasilan Tri Adhianto dalam memenangkan kembali kursi Wali Kota Bekasi pada Pilkada 2024.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi politik PDIP dalam memenangkan pasangan Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe pada Pilkada Kota Bekasi 2024?
2. Bagaimana elektabilitas Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe pada Pilkada Kota Bekasi 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis strategi politik yang digunakan PDIP dalam memenangkan pasangan Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe pada Pilkada Kota Bekasi 2024.
2. Mengidentifikasi elektabilitas Tri Adhianto Tjahyono dan Abdul Harris Bobihoe pada Pilkada Kota Bekasi 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a) Mengembangkan wawasan akademik dalam studi politik, khususnya terkait strategi komunikasi politik, strategi partai, dan teori elektoral.
 - b) Menguatkan atau memperbarui teori yang digunakan, misalnya dengan melihat bagaimana strategi politik PDIP di Kota Bekasi selaras atau berbeda dengan teori yang sudah ada.

- c) Memberikan kontribusi terhadap studi pemilihan dengan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan perilaku pemilih dalam pilkada

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan referensi bagi partai politik dalam Menyusun strategi komunikasi dan mobilisasi pemilih di daerah dengan tantangan elektoral tertentu
- b) Membantu tim sukses dan kandidat memahami faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan dalam Pilkada, sehingga strategi politik dapat lebih efektif di masa depan
- c) Memberikan wawasan bagi pemilih dan Masyarakat mengenai bagaimana partai politik berkompetisi dan memengaruhi opini publik dalam pilkada

E. Kerangka Berfikir

Kemenangan PDIP dalam Pilkada Kota Bekasi 2024 tidak terjadi secara instan, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor elektoral, strategi politik, strategi komunikasi politik, dan perubahan perilaku pemilih. Penelitian ini berangkat dari faktor elektoral yang berpengaruh dalam Pilkada, seperti efek petahana dan perubahan tren pemilih di Kota Bekasi.

Kota Bekasi selama ini dikenal sebagai basis suara PKS, yang identik dengan pemilih Islam perkotaan. Namun pada Pilkada 2024, terjadi pergeseran suara yang menguntungkan PDIP. Menghadapi kondisi tersebut, PDIP menerapkan strategi politik yang meliputi pembangunan koalisi, penguatan jaringan politik, dan mobilisasi pemilih. PDIP juga menyesuaikan strateginya agar dapat menarik pemilih yang sebelumnya loyal kepada PKS, dengan menggarap isu-isu yang relevan bagi Masyarakat Kota Bekasi. Selain strategi politik, PDIP juga mengembangkan strategi komunikasi politik yang efektif. Komunikasi politik ini dilakukan melalui berbagai media, termasuk kampanye digital, media massa, dan pertemuan langsung dengan pemilih (Fitriyanti et al., 2025). Branding kandidat dan pesan kampanye juga dirancang agar sesuai dengan karakteristik pemilih di Kota

Bekasi, sehingga mampu membentuk opini publik yang positif terhadap pasangan Tri Adhianto Tjahyini dan Abdul Harris Bobihoe.

Gabungan antara faktor elektoral, strategi politik, dan strategi komunikasi PDIP berujung pada perubahan perilaku pemilih. Pemilih yang sebelumnya mendukung PKS mengalami pergeseran preferensi akibat pengaruh komunikasi politik, dan kinerja petahana. Akibatnya pada Pilkada 2024, dukungan terhadap PDIP meningkat secara signifikan. Pada akhirnya, kombinasi dari seluruh faktor ini menghasilkan kemenangan PDIP di Pilkada Kota Bekasi 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi politik dan komunikasi PDIP berkontribusi dalam kemenangan tersebut, serta memahami dinamika elektoral yang memengaruhi hasil Pilkada Kota Bekasi, maka disini penulis menyusun kerangka berpikir penelitian yang merupakan pola pikir yang dikembangkan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1.3.





Gambar 1. 3 Kerangka Berpikir